

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah Negara kepulauan yang berciri Nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan batas-batas, hak – hak dan kedaulatan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut sebagaimana amanat Undang-Undang tersebut menjadi suatu vital yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan nasional.

Indonesia dikenal sebagai negara maritime yang sebagian besar luas wilayahnya merupakan perairan dan terdiri atas pulau pulau. Oleh sebab itu sarana transportasi laut sangat penting untuk menghubungkan pulau-pulau yang tersebar di seluruh Indonesia salah satunya sarana transportasi laut adalah angkutan laut yang berupa kapal. Kapal adalah kendaraan pengangkutan penumpang dan barang di laut. Angkutan kapal laut merupakan usaha perusahaan pelayaran yang bergerak dalam penyediaan jasa angkutan laut meliputi jasa angkutan penumpang dan muatan barang.

Sehingga perusahaan pelayaran harus mengurus kapal yang di operasikan pada saat di pelabuhan yang di singgahinya. Kegiatan yang mengurus semua keperluan kapal mulai dari awal kedatangan, pada saat berada di awal pelabuhan hingga waktu keberangkatan. Kebanyakan sarana dan prasarana pengangkutan laut memungkinkan kegiatan usaha pengangkutan dapat berjalan dengan baik, agar tidak terjadi permasalahan pada saat berlayar dan sandar di pelabuhan yang akan dituju. Tetapi pada kenyataan di lapangan banyak terjadi permasalahan perizinan yang bisa dikatakan cukup lama dalam penangannya atau respon balik dari Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap yang lambat.

Pentingnya perantara Transportasi cermin pada penyelenggaraan yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara serta semakin meningkatkan kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas manusia dan barang dari dalam maupun luar negeri. Diharapkan pihak Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan dalam memberikan pelayanan Pelayaran Kelas II Cilacap dapat memberikan kenyamanan dilapangan dan di setiap pegawai Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan diharapkan mampu memahami dan melaksanakan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab.

Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap, dalam proses pelayanan pelayaran atau transportasi laut di kota, merupakan tempat memperoleh data diantaranya seperti yang disebutkan diatas. Maka penulis tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang pelayanan pengurusan Dokumen Sandar Kapal, Kedatangan Kapal, Keberangkatan Kapal, perizinan bongkar muat dengan penelitian dan mendokumentasinya dalam sebuah laporan Karya Tulis dengan judul "Kegiatan Pelayanan Di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pelayaran Kelas II Cilacap".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan mengenai Kegiatan Pelayanan Kedatangan Kapal Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Dalam Kenyamanan dan pengalaman melakukan Observasi serta teori-teori yang di dapat dari buku referensi dan materi perkuliahan, sehingga penulis dapat masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap dalam menangani dokumen pelayaran?
2. Bagaimana tugas dalam rangka meningkatkan pelayanan pelayaran?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan

- a. Mengetahui pelayanan yang diberikan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap dalam memberikan kepuasan pelayanan pelayaran.
- b. Mengetahui sejauh mana tugas Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap dalam menunjang pelayanan pelayaran.

2. Kegunaan Penulisan

a. Bagi Penulis

Sebagai syarat kelulusan program diploma III dan menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang nyata dalam keselamatan pelayanan pelayaran.

b. Bagi Dunia Kemaritiman

Diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Akademi Maritim dalam mengupayakan pelayanan pelayaran.

c. Bagi Institusi

1) Kesyahbandaran

Diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pelayaran.

2) Pendidikan

Digunakan sebagai tambahan wacana atau referensi sehingga dapat menambah pengetahuan dalam meningkatkan mutu pelayanan pelayaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan agar dapat di peroleh saat penyusunan dan pembahasan karya tulis yang sistematis, terarah pada obyek masalah yang di pilih serta tidak bertentangan satu sama lain, maka penulis memberikan gambaran secara garis

besar. Penulis membagi karya tulis yang akan di buat ini menjadi 5 bab yang terdiri dari beberapa sub bagian. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dijelaskan Tinjauan Pustaka mengenai Teori-Teori yang digunakan Penulis dalam Penyusunan Karya Tulis dan Gambaran Umum Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap

BAB 3 Metodologi Penelitian

Pada bab ini akan dibahas mengenai Metodologi Penelitian Penulis. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah Jenis dan Sumber Data dan Metodologi Pengumpulan Data.

BAB 4 Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis menguraikan pembahasan mengenai Rumusan Masalah yang meliputi pelayanan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Tanjung Intan Cilacap dan Pihak-Pihak yang terkait di dalamnya.

BAB 5 Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir, dalam bab penutup ini penulis mengemukakan Kesimpulan dan Saran terhadap Penelitian penulisan di Pelayanan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Intan Cilacap yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai langkah untuk peningkatan kualitas perusahaan.